

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kuba merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Karibia utara, pada pertemuan Laut Karibia, Teluk Meksiko dan Samudra Atlantik. Negara ini merupakan negara bekas jajahan Spanyol yang mengalami revolusi nasional pada tahun 1933 karena adanya kekuatan politik yang berpusat pada negara dan krisis yang membuat rezim yang berkuasa pada saat itu mengalami keruntuhan. Hal ini membuat masyarakat harus turun tangan untuk dapat mengusung kaum elit baru agar dapat membawa Kuba menjadi lebih baik.

Pada tahun 1953 hingga tahun 1959 Fidel Castro maju sebagai pimpinan revolusi untuk menjatuhkan rezim Batista yang dianggap banyak melakukan penyelewengan dan diskriminasi kepada masyarakat Kuba khususnya perempuan. revolusi yang dilancarkan oleh Fidel Castro ini mendapat dukungan dari wanita – wanita Kuba yang ingin ikut berpartisipasi dalam menjalankan misi untuk menjatuhkan rezim Batista. Salah satunya adalah Vilma Espin yang merupakan pelopor dan presiden pertama *Federation of Cuban Women* atau *Federacion De Muejeres Cubanas* yang nantinya menjadi Organisasi Perempuan dengan kemajuan yang cukup signifikan. Selain itu ada Celia Sahnez yang menjadi pemimpin dalam gerakan 26 Juli. (Kusno, Berdikari Online, 2013)

Revolusi Kuba mencapai kesuksesan dengan digulingkannya rezim Batista dan naiknya Fidel Castro sebagai Presiden. Pasca revolusi banyak perubahan yang terjadi dalam pembangunan negara Kuba, dimana Fidel Castro yang memiliki

paham Sosialis-Komunis menjadikan negara Kuba sebagai negara yang mendukung dalam penegakan HAM khususnya terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu Gerakan Perempuan Kuba juga berperan membantu keberhasilan Revolusi Kuba ini disahkan pada tahun 1960 (Cubanas F. D., 2003). Dimana persatuan ini bergerak diberbagai aspek pemberdayaan perempuan di Kuba, seperti dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik sehingga wanita Kuba mendapatkan kesetaraannya.

Gerakan Perempuan yang telah disahkan ini memiliki misimpengaruhi aturan sehingga perempuan dapat ikut aktif dalam pembangunan negara Kuba. Kemajuan perempuan Kuba dalam bidang pendidikan, teknologi, ekonomi dapat dikatakan mengalami perkembangan yang baik dan *equal* sehingga perempuan Kuba mendapatkan hak nya sebagai warga negara, salah satunya adanya hak dalam keterwakilan politik yang setara dengan laki-laki. (Mildenstein N. I., 2000).

Federation of Cuban Women (FMC) bertujuan untuk memberikan wadah bagi kaum perempuan untuk dapat bergabung dengan pembangunan negara dengan adanya kesetaraan di berbagai bidang bagi wanita Kuba. Kemajuan wanita Kuba dalam bidang pendidikan, teknologi, ekonomi dapat dikatakan sangat maju dan *equal* dimana wanita Kuba mendapatkan hak pendidikan dan keterwakilan politik yang setara dengan laki-laki. Dengan tingkat partisipasi wanita dalam level Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan hanya 32% saja dan 27% sebagai Anggota Majelis Nasional pada tahun 2000 (Mildenstein N. I., 2000).

Jika di bandingkan dengan negara lainnya didunia yang dianggap memiliki keterwakilan perempuan di parlemen yang tinggi seperti : Rwanda 63,8%, Bolivia 53,1%, Kuba sendiri menempati kedudukan ke 3 didunia dengan tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen yang tinggi yaitu 48,9% ditahun 2015, negara lainnya adalah Republik *Seychelles* 43,8%, Swedia 43,6%, Afrika Selatan 42,0%, Finlandia 41,5%, Nikaragua 41,3%, Islandia 41,3%, Belanda 37,4%. (Union, 2015)

Sebagai negara pertama yang menandatangani dan negara Kedua yang meratifikasi CEDAW serta sebagai Sekretaris Jendral di CEDAW (Cubanas F. D., 2003), Federasi perempuan di Kuba banyak menjalin aliansi dengan negara-negara lainnya yang memiliki kepentingan yang sama dalam berbagai aspek. Misalnya : kerjasama antara FWC dengan Federasi Wanita Vietnam yang menjalin kerjasama untuk pengembangan Ekonomi, Kerjasama Internasional, dan lainnya. Selain itu Kuba juga bekerjasama dengan Uni Soviet dengan pemberian bantuan dana dari Uni Soviet untuk menstabilkan perekonomian Kuba, dan Kuba memberika bantuan kesehatan serta bantuan tenaga medis untuk ditugaskan di wilayah Uni Soviet. Ini menunjukkan adanya aktifitas Internasional dari gerakan wanita Kuba dengan menjalin kerjasama dengan berbagai negara Internasional dan beberapa negara Amerika Latin lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan sebuah Rumusan Masalah : Mengapa keterwakilan politik perempuan di Kuba tinggi?

C. Kerangka Berfikir

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, dibutuhkan ketelitian dalam menganalisis. Untuk menjawab dan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi diatas maka diperlukan landasan teori, konsep serta didukung dengan berbagai varian ilmu pengetahuan. Untuk menjelaskan mengenai Tingginya Tingkat Keterwakilan Perempuan di Kuba penulis menggunakan konsep Gender dan Teori Keterwakilan Perempuan.

1. Konsep Gender

Sebelum memahami terkait dengan konsep gender penulis akan menjelaskan apa itu Konsep, Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, suatu sifat objek atau suatu fenomena tertentu, atau sebuah kata yang dapat melambangkan sebuah gagasan (Mas'ood, 1990). Seperti Perang, Kekuasaan, Revolusi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau gagasan. Untuk memahami sebuah konsep agar dapat digunakan sebagai alat komunikasi maka dapat dilakukan melalui definisi, dimana definisi terbagi menjadi dua yaitu Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.

Definisi Konseptual adalah definisi yang menggambarkan suatu konsep dengan menggunakan konsep lain, misalnya konsep *Power* menurut definisi konseptual adalah "kemampuan dari suatu aktor (individu, kelompok, atau negara)

untuk mempengaruhi pikiran dan tingkah laku aktor lainnya hingga mau melakukan sesuatu yang tidak disukainya”. Konsep *Power* diatas dijelaskan dengan menggunakan konsep – konsep ‘Kemampuan’, ‘aktor’, ‘pengaruh’, ‘tingkah laku’, dan seterusnya. Definisi konseptual ini terdiri dari istilah turunan sehingga dapat menjelaskan konsep lainnya (Mas'oeed, 1990, pp. 98-99).

Definisi Operasional merupakan serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris agar dapat menjabarkan makna dari konsep tersebut. Contohnya : “integrasi” menurut definisi konseptual integrasi didefinisikan sebagai ‘derajat kohesi yang mengikat anggota-anggota sistem sosial yang pada umumnya dimaksud dalam pengertian nilai, kontak sosial, kerjasama, dan konsensus’. Jadi menurut definisi ini integrasi memiliki 4 dimensi yang didefinisikan secara konseptual dan operasional (Mas'oeed, 1990, p. 100).

Konsep penting yang perlu dibahas terlebih dahulu sebelum membahas tentang konsep kesetaraan gender adalah konsep *sex* dan konsep gender, karena terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan dua konsep tersebut. Konsep *sex* adalah sebuah konsep yang membahas tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis seperti hanya seorang wanita yang bisa melahirkan. Yang dimaksud dengan perbedaan biologis ini adalah perbedaan atau pembeda yang tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang di konstruksi secara sosial atau cultural dimana perubahan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu-kewaktu dan dari tempat-tempat yang lain (Fakih, 1996).

Dari penjelasan terkait dengan perbedaan konsep *sex* dan *gender* dapat dilihat bahwa konsep kesetaraan *gender* adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak-hak sosialnya, misalnya mendapatkan kesetaraannya dalam pembagian kursi di ranah politik, memiliki kesetaraan upah dalam bekerja, dan mendapatkan pendidikan yang setara dengan pendidikan yang didapatkan oleh kaum laki-laki.

Secara termologis 'gender' dapat didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips, 1993). Menurut buku *Speaking of Gender* by Elain Showalter, 'gender' adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Showalter, 1989). Selain kedua definisi diatas, ada juga yang memberikan definisi lain terkait dengan *gender* dimana 'gender' merupakan suatu konsep cultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2004).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum *gender* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam aspek sosial, budaya, dan norma. Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat peran *gender* adalah dimana laki-laki dianggap kuat dan perempuan dianggap lemah. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya diskriminasi atau sub-ordinasi yang dialami oleh wanita akibat dari bentukan budaya masyarakat terkait dengan peran laki-laki dan perempuan di kehidupan sosial. Hal ini juga yang menjadi dasar kaum perempuan membentuk gerakan yang menjunjung tinggi kebebasan dan

kesetaraan untuk kaum perempuan dalam hal kemasyarakatan, dimana perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Kesetaraan Gender atau *Gender Equality* sendiri dapat tercapai apabila ada keterlibatan perempuan dalam ranah politik sehingga perempuan dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal lainnya juga untuk mencapai kesetaraan gender adalah implikasi gender dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang menjadikan perempuan dapat mendapatkan hak nya yang sama dengan laki-laki.

Pada Revolusi yang terjadi di Kuba pada tahun 1959 menempatkan kaum perempuan kuba saat ini memiliki kesetaraan dalam berbagai sektor seperti dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan kehidupan politik yang salahsatunya adalah keterwakilannya di parlemen, selain dari itu perempuan di Kuba juga memiliki kesetaraan dalam mendapatkan gaji dari pekerjaannya yang sama dengan yang didapka oleh kaum laki-laki.

Hal diatas terjadi karena adanya implikasi kesetaraan gender dalam kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahan Kuba telah memberikan ruang yang luas bagi perempuan Kuba dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara tanpa adanya diskriminasi dan stereotip di masyarakat.

2. Teori Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan politik dapat diartikan sebagai terwakilinya kepentingan masyarakat dalam ranah perpolitikan yang mewakili berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Keterwakilan politik tersebut ditentukan oleh sistem perwakilan politik yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Keterwakilan politik dapat dilihat dan diukur dari kemampuan wakil-wakil dalam bertindak mewakili atas nama pihak yang diwakilkan. (Arbi, Perwakilan Politik Di Indonesia, 1985)

Menurut Disertasi Nur Azizah menegaskan bahwa menurut Miki Caul Kittilson keterwakilan politik perempuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu :

1. Kondisi Sosial-Ekonomi

Kondisi Sosial-Ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam rekrutmen anggota legislative perempuan dalam suatu negara. Dimana status sosial perempuan memiliki pengaruh langsung pada partisipasinya dalam lembaga politik dan badan-badan pemilihan. (Shvedova, 1998)

Kondisi Sosial-Ekonomi perempuan Kuba yang sejak masa kepemimpinan Castro meningkat dengan adanya program bantuan pendidikan khusus wanita yang menjadikan wanita Kuba dapat memanfaatkan kesempatannya untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk politik. Hal ini secara langsung dapat mempengaruhi tingkat keterwakilan politik perempuan di Kuba.

2. Sistem Pemilu

Secara konseptual Pemilihan Umum merupakan proses seleksi pemimpin yang akan berpengaruh ada tingkat keterwakilan politik bagi masyarakat luas, hal ini disebabkan oleh peran pemimpin yang berada

dipusat kekuasaan yang di pilih oleh pemilih. (Arbi, Perwakilan Politik Indonesia, 1985)

Instrumen paling penting dalam sebuah sistem pemilu adalah partai. Dalam konteks ini Kuba dibawah pimpinan Fidel Castro menetapkan sistem satu partai Komunis, dimana partai tersebut menjadi wadah bagi perempuan Kuba untuk meningkatkan keterwakilan politiknya. Hal ini juga didukung oleh paham Sosialis yang mementingkan kepentingan masyarakat bersama dibandingkan dengan kepentingan individual seperti dalam pemberian hak kepada perempuan Kuba untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan.

3. Strategi Khusus (Kuota)

Strategi Khusus dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah tergabungnya perempuan dalam partai politik, dimana partai politik menjadi wadah untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dengan memberikan kuota sekitar 48,9% bagi perempuan Kuba untuk menempati kursi Parlemen atau 299 kursi dari 612 kursi untuk perempuan Kuba di parlemen. (Union, 2015)

Dan untuk memenuhi kuota perempuan dalam parlemen, pemerintahan menyelipkan pendidikan-pendidikan yang berbau politik didalam pendidikan keterampilan yang didapatkan oleh perempuan Kuba dengan tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan Kuba dalam parlemen. Saat ini Kuba memiliki keterwakilan wanita di

parlemen. Diantaranya sebagai Menteri dan anggota dari Majelis Nasional lainnya.

4. Gerakan Perempuan

Gerakan Perempuan merupakan variabel yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keterwakilan politik perempuan di Kuba. Dimana gerakan perempuan memberikan kontribusi yang besar dalam proses pembangunan negara di Kuba. Seperti keikutsertaan perempuan Kuba untuk memberantas buta huruf di Kuba, meningkatkan pendidikan bagi perempuan Kuba dengan mendirikan sekolah-sekolah perempuan di seluruh pelosok Kuba.

Hal ini menunjukkan bahwa ada peran wanita dalam proses pembangunan di Kuba. Disisi lain *Federacion De Mujeres Cubanas* (FMC) atau *Federation of Cuban Women* (FCW) juga sedang berusaha untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam pengambilan keputusan dengan mendorong dan mendukung wanita Kuba yang bekerja dengan baik, dalam artian memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin (Mildenstein N. I., 2009).

Dari faktor-faktor diatas, dapat di lihat bahwasannya tingkat keterwakilan perempuan dapat diukur sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat keterwakilan politik perempuan Kuba. Semakin tinggi variable, semakin tinggi pula tingkat keterwakilan politik perempuan. (Kittilson, 1999).

D. Hipotesa

Dari penerapan Konsep dan teori diatas maka dapat ditarik hipotesa dimana tingginya keterwakilan politik perempuan Kuba disebabkan oleh :

Pertama, kuatnya Gerakan Perempuan yang memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kondisi sosial-ekonomi perempuan di Kuba.

Kedua, adanya dukungan sistem pemilu, khususnya penerapan sistem kuota yang member jalan bagi perempuan untuk terlibat secara penuh dalam politik

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk :

1. Untuk mengetahui alasan dibalik tingginya tingkat keterwakilan Politik Perempuan Kuba.
2. Untuk mengimplementasikan teori dalam memahami keterwakilan perempuan Kuba dalam parlemen.
3. Untuk syarat dalam memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian : Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah yang bersifat deskriptif analisis.
2. Metode Pengumpulan data : Menggunakan pengumpulan data sekunder ; bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel

3. Analisis Data : Menggunakan saran Miki Caul Kittilson yaitu Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat keterwakilan Perempuan di Kuba, yaitu : Kondisi Sosial-Ekonomi, Sistem Pemilu, Strategi Khusus, dan Gerakan Perempuan

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah pada masa kepresidenan Fidel Castro 1960-2008.

Fokus Utama dari Penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Keterwakilan Politik Perempuan di Kuba.
2. Tingkat Keterwakilan Politik Perempuan di Kuba.

H. Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika Penulisan, penulis akan memfokuskan diri pada Partisipasi Politik wanita Kuba yang tinggi.

Pada BAB I penulis akan membahas tentang Latar belakang masalah yang menceritakan tentang hal yang menarik penulis untuk membahas tentang 'Keterwakilan Politik Perempuan Kuba di Era Kepemimpinan Fidel Castro', Rumusan masalah, Landasan teori, hipotesa, dan sistematika penulisan.

Pada BAB II akan menceritakan tentang Ideologi dan Sistem Pemerintahan Kuba serta Sistem Politik Negara Kuba.

Pada BAB III penulis akan menceritakan tentang Keterwakilan Politik Perempuan di Kuba.

Pada BAB IV penulis akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterwakilan politik perempuan di Kuba.

BAB V : Merupakan Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.